

MANAJEMEN STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PADA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Teno Sulistyanto¹, Harry Nenobais², Muhammad Hanan Rahmadi³

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's capital city to Nusantara (IKN) is a national strategic initiative requiring complex governance and adaptive strategic management. While previous studies mainly focus on legal, infrastructural, or policy aspects of IKN development, limited research examines strategic management practices within the Nusantara Capital Authority (Otorita IKN) as the implementing institution. This study analyzes the implementation of strategic management in improving organizational performance using Bryson's (2007) strategic planning framework. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that strategic management at the IKN Authority is supported by regulatory legitimacy, visionary leadership, stakeholder collaboration, and digital governance systems. However, bureaucratic adaptation, cross-sector coordination complexity, land disputes, and funding sustainability remain significant challenges. The study contributes theoretically by contextualizing Bryson's framework within a large-scale national transformation project and empirically by identifying governance strengthening priorities for long-term institutional performance.

Keywords: Strategic Management, Organizational Performance, Public Governance, IKN Authority

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara merupakan proyek transformasi nasional yang menuntut tata kelola dan manajemen strategis yang adaptif. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum, infrastruktur, dan kebijakan pembangunan IKN, namun masih terbatas yang menganalisis penerapan manajemen strategis pada Otorita IKN sebagai institusi pelaksana. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Otorita IKN dengan menggunakan kerangka teori Bryson (2007). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategis didukung oleh legitimasi regulasi, kepemimpinan visioner, kolaborasi pemangku kepentingan, serta digitalisasi tata kelola. Namun, tantangan berupa adaptasi birokrasi, kompleksitas koordinasi lintas sektor, sengketa lahan, dan keberlanjutan pendanaan masih memerlukan penguatan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui kontekstualisasi teori Bryson dalam proyek transformasi nasional berskala besar serta kontribusi praktis dalam perumusan penguatan tata kelola Otorita IKN.

Kata Kunci: Manajemen Strategis, Kinerja Organisasi, Tata Kelola Publik, Otorita IKN

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan beragam, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 270 juta penduduk. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembangunan dan pemerataan, terutama di antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Peran pemerintah diharapkan dapat menangani kesenjangan pembangunan. Salah satu upaya

pemerintah untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan merencanakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lokasi baru ini lebih dikenal dengan nama Nusantara atau Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju tahun

2045, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kedaulatan dan integritas nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan (Al-hamid, 2023). Proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan penduduk, serta mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur (Habib et al., 2024).

Namun, proyek strategis sebesar ini tentu tidak mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, manajemen proyek menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan dan menyelesaikan proyek IKN (Dewi & Tarumanagara, 2024). Penelitian ini secara komprehensif akan mengkaji informasi terkait master plan, progres terbaru, hambatan dan tantangan, hingga strategi pemerintah terkait dengan manajemen proyek IKN. Master plan merupakan berkas yang berfungsi untuk menjelaskan terkait perencanaan pengembangan supaya lebih sistematis (Bappenas., 2020). Master plan mencakup desain perkotaan, lanskap, infrastruktur, penyediaan layanan, sirkulasi, penggunaan lahan sekarang dan masa depan, dan bentuk bangunannya. Master plan juga menunjukkan konsep pembangunan keseluruhan yang mencakup visi kawasan yang mensejahterakan semua penghuninya, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Master plan IKN disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan konsultan internasional AECOM dan Nippon Koei. Kemudian, disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” (Sons et al., 2025).

Selain itu, disebutkan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara akan membangun tiga kawasan utama, yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Barat, dan Kawasan Timur. KIPP direncanakan akan menjadi kawasan yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, diplomasi, dan protokoler. Kawasan ini meliputi Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR/DPD, Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, BIN, Kedutaan Besar, dan lain-lain. Sementara Kawasan Timur dan Barat akan difokuskan menjadi kawasan perkantoran, bisnis, pusat pengembangan talenta, perguruan tinggi, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan laman resmi Kementerian PUPR, seluruh pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 103 proyek konstruksi dengan total biaya USD1,59 miliar atau Rp23.94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah (Sumiati, et al, 2024).

Keberhasilan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat bergantung pada penerapan manajemen strategis yang efektif (Lemhannas RI., 2024). Salah satu teori yang dapat diterapkan pada penelitian ini adalah Teori Bryson mengenai perencanaan strategis yang berbasis pada nilai-nilai (value-based strategic planning) memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis proses perencanaan dan implementasi strategi di organisasi Otorita IKN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Otorita IKN telah menerapkan prinsip-prinsip

perencanaan strategis berbasis nilai-nilai menurut Bryson, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan rencana strategis. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek ambisius yang menuntut perencanaan strategis yang matang. Teori Bryson mengenai perencanaan strategis berbasis nilai-nilai dapat menjadi kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis proses perencanaan di Otorita IKN.

Manajemen strategis merupakan salah satu elemen krusial dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, terutama di lingkungan yang dinamis dan penuh tantangan seperti Otorita IKN. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Peningkatan kinerja organisasi ini sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan dan pengembangan kawasan.

Penerapan manajemen strategis yang baik di Otorita IKN dapat menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta pencapaian visi besar pemerintah dalam menciptakan Ibu Kota Nusantara yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana manajemen strategis dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi di Otorita IKN, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen strategis di Otorita IKN. Penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive terdiri atas pejabat Otorita IKN, perencana nasional, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat adat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen Strategis dalam Organisasi Publik

Manajemen strategis merupakan proses sistematis yang digunakan organisasi untuk menetapkan arah jangka panjang melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Dalam konteks sektor publik, manajemen strategis tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada akuntabilitas, legitimasi, dan kepentingan publik.

Bryson (2007) mendefinisikan manajemen strategis sektor publik sebagai upaya terstruktur untuk menghasilkan keputusan dan tindakan fundamental yang membentuk dan membimbing apa yang dilakukan organisasi, untuk siapa, dan bagaimana organisasi tersebut beroperasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan, kejelasan mandat, serta adaptasi terhadap lingkungan strategis.

Bryson dan George (2020) menegaskan bahwa organisasi publik menghadapi lingkungan yang kompleks, ditandai oleh tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan transparansi. Oleh karena itu, manajemen strategis dalam sektor publik harus bersifat kolaboratif dan adaptif.

Dalam konteks pembangunan berskala nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), penerapan manajemen strategis menjadi krusial karena melibatkan banyak aktor lintas sektor, kepentingan politik, serta dampak sosial yang luas.

2. Tahapan Manajemen Strategis Menurut Bryson

Bryson (2007) mengemukakan sepuluh langkah utama dalam perencanaan strategis sektor publik, yang secara garis besar meliputi:

- a. Memulai dan menyepakati proses perencanaan strategis
- b. Mengidentifikasi mandat organisasi
- c. Memperjelas misi dan nilai organisasi
- d. Menilai lingkungan eksternal dan internal
- e. Mengidentifikasi isu strategis
- f. Merumuskan strategi
- g. Mengadopsi rencana strategis
- h. Menetapkan visi organisasi
- i. Mengembangkan proses implementasi
- j. Mengevaluasi dan meninjau kembali strategi

Kerangka ini menekankan bahwa organisasi publik harus memahami kewenangan hukumnya sebelum merumuskan strategi. Selain itu, evaluasi berkelanjutan menjadi komponen penting untuk memastikan organisasi berfungsi sebagai learning organization.

Poister, Pitts, dan Edwards (2010) menyatakan bahwa organisasi publik yang menerapkan manajemen strategis secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam efektivitas kinerja, koordinasi lintas sektor, dan akuntabilitas.

3. Kinerja Organisasi Publik

Kinerja organisasi publik merujuk pada tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan mandatnya secara efektif dan efisien. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, kinerja sektor publik diukur melalui indikator tata kelola, kualitas layanan, transparansi, dan dampak sosial.

Menurut Poister et al. (2010), kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh kejelasan tujuan strategis, kapasitas sumber daya manusia, sistem evaluasi kinerja, serta kepemimpinan yang efektif. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja seperti SAKIP menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di Indonesia.

Dalam konteks Otorita IKN, kinerja organisasi tidak hanya diukur dari capaian fisik pembangunan, tetapi juga dari kemampuan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan keberhasilan pengelolaan isu sosial.

4. Analisis Lingkungan Strategis (SWOC)

Analisis lingkungan strategis merupakan tahapan penting dalam manajemen strategis. Bryson (2007) menyatakan bahwa organisasi publik harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mempengaruhi keberhasilan strategi.

Pendekatan SWOC (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges) membantu organisasi memahami kondisi internal dan eksternal secara komprehensif. Fitri et al. (2025) menjelaskan bahwa analisis lingkungan yang sistematis meningkatkan kemampuan organisasi dalam merumuskan strategi adaptif.

Dalam proyek transformasi besar seperti IKN, analisis lingkungan strategis sangat penting mengingat adanya dinamika ekonomi global, risiko sosial, serta ketergantungan pada pendanaan pemerintah dan investasi.

5. Kolaborasi dan Tata Kelola dalam Proyek Strategis Nasional

Pembangunan proyek strategis nasional memerlukan tata kelola kolaboratif (collaborative governance).

Melati et al. (2022) menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Dalam konteks IKN, kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, investor, dan masyarakat adat menjadi faktor penentu keberhasilan. Suharyani (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam strategi organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspirasi pemindahan Ibu Kota ke daerah lain telah ada sejak era Presiden Soekarno. Gagasan pemindahan ibu kota oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul pada tanggal 17 Juli 1957 dan memilih Kota Palangkaraya. Alasan dipilihnya Palangkaraya yaitu karena wilayahnya yang luas serta letaknya tepat ditengah kepulauan Indonesia. Namun, rencana pemindahan ibu kota tersebut tidak terealisasikan. Gagasan pemindahan Ibu Kota juga pernah ada di era Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres di tahun 1997 yang memuat terkait Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri, yang ditujukan sebagai pusat pemerintahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahannya di tahun 2013 juga mengangkat terkait pemindahan Ibu Kota dengan gagasan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, atau pemindahan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.

Rencana pemindahan Ibu Kota oleh era pemerintahan presiden terdahulu yang sebelumnya hanya menjadi aspirasi baru dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keputusan Presiden Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota keluar dari pulau Jawa keluar pada tanggal 29 April 2019, yang

dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Presiden Joko Widodo membentuk Otorita IKN yang difungsikan sebagai lembaga yang sejajar dengan kementerian.

Otorita IKN mempunyai tugas sebagai penanggungjawab untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Kelembagaan Otorita IKN telah dipersiapkan dan disahkan dalam regulasi peraturan yang berkaitan dengan Otorita IKN seperti Perka IKN Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023. Proses penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara akan dilakukan secara bertahap dan terencana dalam jangka panjang.

Tahapan pembangunan ini dimulai pada Tahun 2022 dan terbagi menjadi lima tahapan pembangunan yang meliputi Tahap I (2022-2024), Tahap II (2025-2029), Tahap III (2030-2034), Tahap IV (2035-2039), dan Tahap V (2040-2045). Pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini telah berjalan, dan sudah melalui tahap pertama pembangunan yaitu periode pembangunan tahun 2020-2024. Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga terus berlanjut di fase ke-2 dengan tema “Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai Area Inti yang Tangguh” pada tahun 2025-2029.

Memulai dan Menyetujui Proses Perencanaan Strategis

Langkah pertama dalam teori (J. Bryson & George, 2020) menekankan pentingnya membangun kesepakatan dan komitmen awal antar pemangku kepentingan dalam memulai proses perencanaan strategis. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menginisiasi

proses ini melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, swasta, serta akademisi. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Kerjasama Otorita IKN menyatakan bahwa proses perencanaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan integrasi kebijakan lintas kementerian.

Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa proses awal perencanaan telah mengikuti prinsip inclusive decision-making, sebagaimana dijelaskan oleh Bryson bahwa proses perencanaan strategis publik harus dimulai dengan legitimasi kelembagaan dan keterlibatan pihak yang berwenang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sumiati et al (2024), bahwa tahap awal perencanaan strategis berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi proyek pemerintah berskala besar, khususnya pada pembangunan IKN yang bersifat kompleks dan multidimensi. Koordinasi lintas sektor juga memperkuat integrasi data dan kebijakan. Pendekatan ini mendukung teori evidence-based strategic planning yang juga ditemukan dalam studi (Dewi & Tarumanagara, 2024), di mana perencanaan berbasis data dan bukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi kebijakan publik.

Identifikasi Mandat Organisasi

Menurut (J. Bryson & George, 2020) adalah identifikasi mandat organisasi. Dalam konteks Otorita IKN, mandat formal diberikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, yang menetapkan Otorita IKN sebagai lembaga pemerintah nonkementerian dengan tugas utama merencanakan, membangun, dan memindahkan pusat pemerintahan negara. Mandat ini memberi arah

strategis yang jelas sesuai prinsip Bryson, yaitu setiap organisasi publik harus memahami kewenangan dan batas tugasnya sebelum merumuskan strategi.

Sejalan dengan itu, Syarif et al (2023) menyebutkan bahwa kejelasan mandat organisasi menjadi pondasi utama dalam menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga, terutama dalam proyek nasional yang bersifat lintas sektor seperti IKN. Kejelasan mandat juga memperkuat legitimasi publik. Penegasan ini sejalan dengan temuan Habib et al (2024) yang menyoroti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan nasional bergantung pada kejelasan otoritas dan legitimasi lembaga pelaksana.

Memperjelas Misi dan Nilai Organisasi

Organisasi publik harus memperjelas misi dan nilai yang mendasari setiap keputusan strategis. Dalam hal ini, Otorita IKN memiliki misi untuk mewujudkan “Kota Dunia untuk Semua” dengan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan, dan inovasi. Kejelasan nilai ini penting karena menjadi dasar moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Suharyani dan Djumarno, (2023) menjelaskan bahwa kejelasan nilai organisasi publik meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas implementasi kebijakan. Di Otorita IKN, nilai tersebut diterjemahkan ke dalam indikator kinerja strategis seperti pembangunan kota rendah emisi dan efisiensi tata ruang hijau. Hal ini sejalan dengan penelitian (Melati et al., 2022), yang menemukan bahwa keberhasilan implementasi strategi di lembaga publik bergantung pada komitmen terhadap nilai-nilai organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi kolaboratif.

Menilai Lingkungan Eksternal dan Internal

Analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi, yang menurut Bryson menjadi dasar dari perumusan strategi yang adaptif. Otorita IKN melakukan analisis SWOC untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Temuan ini menggambarkan bahwa proses evaluasi internal sudah dilakukan secara sistematis. Menurut Fitri et al., (2025) analisis SWOC dalam lembaga publik membantu menemukan area perbaikan organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan makro dan tantangan sumber daya manusia. Faktor eksternal juga menjadi pertimbangan penting, terutama dalam konteks ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

Bryson dan George, (2007) menekankan bahwa keberhasilan strategi publik tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh sejauh mana organisasi mampu membaca dinamika eksternal yang berubah cepat. Seperti dukungan regulasi melalui Perpres No. 63 Tahun 2022, legitimasi politik, serta alokasi APBN yang besar, menjadi modal utama dalam memperkuat perencanaan berbasis data yang ditekankan dalam langkah – langkah perbaikan manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Otorita IKN. Dukungan politik dan regulasi memungkinkan Otorita IKN membangun sistem tata kelola digital dan kebijakan jangka panjang tanpa khawatir akan terhambat dinamika politik sesaat. Kekuatan finansial dari APBN perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung smart governance agar proses monitoring dan evaluasi kinerja lebih akurat serta transparan.

Kedua, kelemahan (Weaknesses) Otorita IKN, seperti ketergantungan pada APBN, keterbatasan kapasitas

birokrasi, dan kompleksitas koordinasi lintas sektor, memperkuat urgensi langkah-langkah perbaikan manajemen yang disebutkan dalam langkah – langkah perbaikan manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Otorita IKN. Seperti, rekomendasi mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan ASN dan pemanfaatan teknologi digital dapat langsung menjawab kelemahan ini. Selain itu, kebutuhan akan sistem koordinasi terpadu dapat diatasi dengan membangun platform informasi bersama antar Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan, sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka manajemen strategis.

Ketiga, peluang (Opportunities) yang tersedia, seperti meningkatnya minat investasi, dukungan internasional, dan pengembangan superhub ekonomi, dapat diintegrasikan ke dalam strategi diversifikasi pendanaan yang menjadi bagian dari langkah perbaikan manajemen. langkah – langkah perbaikan manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Otorita IKN, menggaris bawahi perlunya keterlibatan swasta dan mitra internasional dalam pembiayaan pembangunan. Analisis SWOC memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa peluang eksternal dapat digunakan untuk mengurangi kelemahan ketergantungan pada APBN, sekaligus memperluas jejaring kerjasama strategis Otorita IKN di tingkat global. Keempat, tantangan (Challenges) seperti risiko bencana, resistensi masyarakat adat, dinamika politik nasional, dan fluktuasi ekonomi global, menjadi landasan bagi perlunya langkah-langkah mitigasi dalam manajemen strategis Otorita IKN. langkah – langkah perbaikan manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Otorita IKN,

menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan sosial-ekologis yang inklusif. Analisis SWOC melengkapi temuan ini dengan memberikan dasar faktual bahwa tantangan eksternal hanya dapat ditekan apabila manajemen strategis Otorita IKN mampu memanfaatkan kekuatan regulasi, kelembagaan khusus, serta membangun diplomasi publik yang lebih intensif.

Mengidentifikasi Isu-Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Di Otorita IKN, isu utama meliputi kepemilikan lahan, keterbatasan dana, dan resistensi sosial masyarakat adat. Isu ini menunjukkan pentingnya sensitivitas sosial dalam pembangunan IKN. (Bryson., 2007) menegaskan bahwa pengenalan isu strategis membantu organisasi mengantisipasi tantangan besar sebelum menjadi krisis. (Sholly Salam Sitompul, dan Sadu Wasistiono, 2021) juga menunjukkan bahwa penyelesaian isu agraria dan tata kelola aset merupakan kunci keberhasilan strategi pembangunan daerah. Hal ini memperlihatkan implementasi prinsip strategic issue management, di mana isu diidentifikasi sejak awal untuk meminimalkan risiko sosial dan administratif.

Merumuskan Strategi untuk Mengelola Masalah

Setelah isu teridentifikasi, Otorita IKN merumuskan strategi untuk menanganinya. Bryson., (2007) menyebut bahwa strategi yang efektif harus kolaboratif dan adaptif. Strategi ini sejalan dengan hasil penelitian Melati et al (2022), yang menyatakan bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta meningkatkan efektivitas manajemen investasi dan mempercepat implementasi kebijakan publik. Selain

aspek pendanaan, strategi komunikasi publik juga menjadi prioritas. Pendekatan komunikasi strategis ini mencerminkan pandangan Bryson bahwa strategi publik bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang legitimasi sosial dan dukungan publik yang berkelanjutan.

Meninjau dan Mengadopsi Rencana atau Beberapa Rencana Strategis

Otorita IKN telah merumuskan berbagai strategi untuk mengelola isu strategis tersebut, seperti memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, melibatkan masyarakat adat Paser dan Balik, serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan BUMN. Strategi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif sebagaimana dianjurkan oleh (Bryson., 2007) dalam manajemen strategis sektor publik. Pada langkah ketujuh dalam teori Bryson adalah meninjau dan mengadopsi rencana strategis yang telah disusun agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Otorita IKN secara rutin melakukan evaluasi rencana kerja setiap triwulan untuk menyesuaikan target dengan perkembangan lapangan.

Hal ini memperlihatkan bahwa Otorita IKN telah menerapkan prinsip strategic alignment sebagaimana dikemukakan oleh Bryson (2007), yakni memastikan bahwa strategi tetap konsisten dengan misi dan kondisi aktual organisasi. Menurut penelitian Sudiantini et al (2023), proses review strategis yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan mencegah stagnasi organisasi publik.

Menetapkan Visi Organisasi yang Efektif

Visi organisasi menurut Bryson (2007), merupakan pernyataan ideal yang menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Otorita IKN menetapkan visinya sebagai “Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua” dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan daya saing global.

Visi tersebut mencerminkan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana diuraikan oleh Syafa Muhammad Aufa Sons (2025) dalam penelitiannya mengenai konsep Future Smart Forest City. Visi yang kuat memberikan arah dan motivasi bagi seluruh anggota organisasi untuk bekerja menuju tujuan yang sama.

Sejalan dengan pandangan Poister et al (2005), visi yang efektif harus diterjemahkan menjadi indikator kinerja yang dapat diukur agar menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya organisasi publik.

Mengembangkan Proses Implementasi yang Efektif

Langkah kesembilan menekankan pentingnya implementasi strategi secara efektif. Otorita IKN mengembangkan implementasi berbasis teknologi digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Bryson (2007), menjelaskan bahwa keberhasilan strategi publik tidak hanya bergantung pada perumusan, tetapi juga pada kemampuan implementasi yang efektif melalui struktur, sistem, dan budaya kerja yang adaptif. Studi Sumiati, (2024), mendukung hal ini dengan menyebutkan bahwa digitalisasi birokrasi dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi publik di lembaga pemerintah besar seperti Otorita IKN. Implementasi strategi juga menuntut kepemimpinan yang kolaboratif.

Penelitian Suwardhani (2025), menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan budaya kolaboratif adalah faktor kunci dalam memastikan strategi

organisasi publik dapat diimplementasikan secara efektif. Pendekatan ini membuat Otorita IKN lebih adaptif terhadap tantangan baru di era transformasi digital dan keberlanjutan.

Menilai Kembali Strategi dan Proses Perencanaan Strategis

Langkah terakhir menurut Bryson (2007) adalah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi dan proses perencanaan. Otorita IKN telah menerapkan sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan monitoring triwulanan sebagai instrumen evaluasi. Evaluasi ini mencerminkan prinsip learning organization yang ditekankan oleh Bryson, di mana organisasi publik harus terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Poister et al (2010), juga menegaskan bahwa evaluasi yang sistematis memungkinkan organisasi publik untuk menyesuaikan strategi sesuai hasil kinerja dan kebutuhan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Tarumanagara, (2024) yang menunjukkan bahwa proses evaluasi yang menilai baik hasil maupun proses meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi publik secara signifikan. Dengan demikian, Otorita IKN telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip evaluasi adaptif yang menekankan perbaikan berkelanjutan.

Manajemen strategis di Otorita IKN memegang peran sentral dalam memastikan setiap program pembangunan IKN berjalan sesuai visi “mewujudkan Ibu Kota Negara yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global”. Penerapan manajemen strategis di Otorita IKN mengacu pada proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi yang selaras dengan

kebijakan nasional serta kebutuhan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dapat disimpulkan bahwa Otorita IKN telah mengimplementasikan manajemen strategis secara relatif sistematis melalui tahapan perumusan, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Perumusan strategi dilakukan dengan mengacu pada visi, misi, dan mandat organisasi yang ditetapkan dalam regulasi, sementara implementasi strategi diwujudkan melalui penguatan struktur organisasi, koordinasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan strategis yang adaptif.

Evaluasi dan pengendalian strategi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan strategis dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan. Efektivitas penerapan manajemen strategis di Otorita IKN dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor pendukung internal meliputi dukungan regulasi pemerintah pusat, komitmen kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem

perencanaan dan pengendalian. Namun demikian, masih terdapat kelemahan berupa ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan integrasi data antar sektor, serta penyesuaian birokrasi dalam organisasi yang relatif baru. Dari sisi eksternal, peluang muncul melalui dukungan politik nasional dan potensi investasi, sementara tantangan berasal dari dinamika ekonomi global serta persoalan sosial, khususnya terkait kepemilikan lahan dan penerimaan masyarakat.

Penerapan strategi manajemen yang dilakukan Otorita IKN terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam aspek tata kelola, transparansi, dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Implementasi digitalisasi sistem monitoring, penguatan kolaborasi antarlembaga, serta penerapan perencanaan adaptif meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan strategis. Temuan ini menegaskan bahwa praktik manajemen strategis Otorita IKN selaras dengan teori Bryson (2007), yang menekankan pentingnya kejelasan mandat, keterlibatan pemangku kepentingan, serta evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hamid, S. A. S. (2023). Jurnal Hukum & Pembangunan KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM. 53(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1505>
- Bryson, J., & George, B. (2020). Strategic Management in Public Administration Strategic Management in Public Administration. April, 1–26. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1396>
- Bryson, J. M., Edwards, L. H., Slyke, D. M. Van, Bryson, J. M., Edwards, L. H., & Slyke, D. M. Van. (2018). Getting strategic about strategic planning research. Public Management Review, 20(3), 317–339. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1285111>
- Budiharjo. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kepuasan Masyarakat pada

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik, 8(1), 21–27.
- Dewi, R., & Tarumanagara, U. (2024). Model Manajemen Program Terhadap Keberhasilan Proyek Konstruksi: Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). XIII (2), 1–6.
- Jabatan, T., & Ikn, K. (2024). Analisis Sistem Manajemen Mutu pada Proyek Pembangunan Rumah. 2(2), 111–120.
- Melati, R., Bakri, S., Nirwana, H., Alief, M., & Imran, F. (2022). Amkop Management Accounting Review (AMAR) Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Abstrak. 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.37531/amar.v2i2.147>
- Muhammad, S., Sons, A., Hukum, F., & Gadjah, U. (n.d.). Analisis Yuridis Penerapan Smart Forest City di Ibu Kota Nusantara: Harmonisasi antara Pembangunan dan Konservasi rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang dirancang sebagai pusat. 1(1), 24–51.
- No Title. (2025). 10, 213–231.
- Poister, T. H., Pitts, D. W., & Edwards, L. H. (2010). The American Review of Public Administration. <https://doi.org/10.1177/0275074010370617>
- Sholly Salam Sitompul, Sadu Wasistiono, F. S. (2021). Manajemen strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan kabupaten kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah. Jurnal Visioner, 3, 607–620.
- Sudiantini, D., Jasmine, P. D., Setiawan, T., & Pratama, R. A. (2023). Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Pada SMAS Widya Nusantara , Bekasi). 1(2).
- Suwardhani, A. D. (2025). Strategi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi di Era Digital. 4(4), 2657–2664.
- Yenny Dwi Suharyani, D. (2023). Perencanaan Strategis dan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(2), 767–778.